



PEMERINTAH
KABUPATEN
TEMANGGUNG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)

INSPEKTORAT TAHUN 2026

HALAMAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

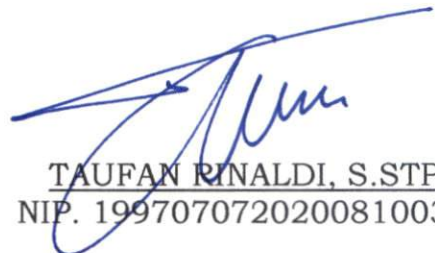
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 21 Agustus 2026

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP, M.M
NIP. 198311182002122001

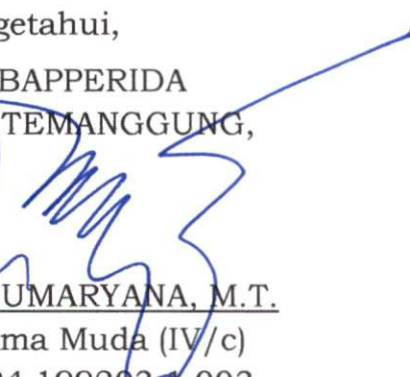
Petugas Verifikator,



TAUFAN RINALDI, S.STP.
NIP. 199707072020081003

Mengetahui,

**KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, petunjuk, kemudahan, serta kesehatan yang telah diberikan, sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penyempurnaan terhadap dokumen Renja Inspektorat Tahun 2026 yang telah disusun sebelumnya. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika perubahan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026, guna mendukung percepatan pencapaian indikator kinerja Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Perubahan Renja ini juga merupakan respons terhadap perkembangan kondisi, tantangan, dan permasalahan aktual yang dihadapi selama pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan, khususnya dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung pada masa mendatang.

Akhirnya, kami berharap Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 28 Agustus 2026

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ING KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

DAFTAR ISI		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN VERIFIKASI		ii
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		iv
BAB I	PENDAHULUAN.	1
	1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan I Tahun 2026	6
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	31
	3.1 Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	31
	3.2 Matriks Rencana Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2026	37
BAB IV	PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	10
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Program Inspektorat Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan I Tahun 2026	8
Tabel 2.3	Capaian Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026 Inspektorat Kabupaten Temanggung	22
Tabel 3.1	rencana perubahan Renja Tahun 2026	32
Tabel 3.2	Perubahan Program dan Kegiatan Inspsktorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan, maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, maka Perangkat Daerah harus segera menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2026 dengan pagu APBD tahun 2026;
- b. Munculnya sub kegiatan baru;
- c. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;

- d. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;

Inspektorat Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 melalui tahapan-tahapan :

- 1) Persiapan penyusunan;
- 2) Penyusunan rancangan awal;
- 3) Penyusunan rancangan;
- 4) Perumusan rancangan akhir.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2026;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

21. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2026, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung yang akan dilaksanakan pada triwulan II, triwulan III dan triwulan IV tahun 2026;

3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2025
 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan I Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung sampai dengan triwulan I sesuai dengan kriteria pencapaiannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Capaian indikator kinerja disajikan sebagai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90,00\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75,00\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65,00\%$	Rendah
5	$\leq 50,00\%$	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berikut adalah capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung, sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja IKUPD dan Kinerja Program dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah;
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah;
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung; dan
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 merupakan tahun kedua penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

A. Evaluasi Kinerja IKUPD dan Program

Capaian kinerja IKUPD dan Program Inspektorat Kabupaten Temanggung disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program Inspektorat Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	Skala Penilaian Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
				Target	Realisasi s/d TW I 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN							
BIDANG URUSAN INSPEKTORAT DAERAH							
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)							
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah						
1		Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	81,00	91,59	100,00	Sangat Tinggi
2		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	79,00	78,15	98,92	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Tata Kelola pemerintahan	Maturitas SPIP	Angka	3,125	2,979	98,92	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,003	2,42	80,59	Tinggi
5	Meningkatnya Pencegahan, pengelolaan dan pengendalian korupsi yang optimal	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	3,003	2,91	96,90	Sangat Tinggi
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan						

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	Skala Penilaian Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
				Target	Realisasi s/d TW I 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irbn (I. II. III.IV. Khusus)	%	100	13,29	13,29	Sangat Rendah
2	Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	%	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pelaksanaan Penyelenggaraan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%	100	100	100	Sangat Tinggi
C	Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi						
4	Mewujudkan Keyakinan Terhadap Proses Pengawasan	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan	%	100	0	0	Sangat Rendah
5	Mewujudkan komitmen pembangunan Zona Integritas	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100	0	0,00	Sangat Rendah
6	Meningkatnya Identifikasi Resiko dan Pengendaliannya pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	100	23,91	23,91	Sangat Rendah
7	Meningkatnya respon terhadap aduan masyarakat	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing. Benturan Kepentingan. dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	Sangat Tinggi

Sumber : IKPD Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat kabupaten Temanggung dengan capaian kinerja semua indikator mencapai peringkat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan rincian sebagai berikut :

A). INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nilai IKM Perangkat Daerah

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah :

- a. SDM yang terampil dan motivasi kerja yang tinggi;
- b. Adanya pelatihan bagi SDM guna peningkatan ilmu pengetahuan dan memberi pelayanan terbaik;
- c. Komitmen Pimpinan terhadap peningkatan pelayanan.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah

- a. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai (keterbatasan fasilitas dan ruang merokok);
- b. Informasi pelayanan yang belum diketahui perangkat daerah;

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :

- a. Memperbaiki sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan;
- b. Mengirim peserta untuk mengikuti diklat, workshop terkait pelayanan publik baik secara daring maupun tatap muka;
- c. Mengusulkan anggaran guna pemenuhan sarpras dan pelatihan pegawai

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah

- a. Dokumen perencanaan telah memenuhi standar yang baik
- b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien, telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah

- a. Dokumen perencanaan yang ada belum menyajikan informasi yang berkaitan dengan kinerja bidang lain (crosscutting)
- b. Belum ada rapat rutin/monev triwulanan atau semesteran yang dipimpin oleh Inspektur
- c. Belum ada dokumen/notulen rapat mengenai laporan kinerja

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut Adalah :

- a. Memperbaiki dokumen perencanaan dengan menambahkan informasi crosscutting;

- b. Mendokumentasikan rapat capaian monev triwulan atau semesteran yang dipimpin oleh inspektur;
- c. Mendokumentasikan rapat mengenai laporan kinerja;

3. Maturitas SPIP

1) Faktor pendorong indikator tersebut Adalah :

- a. Sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SPIP
- b. Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung
- c. Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Ling. ungan Pemkab Temanggung;
- d. Perbup Nomor 7 Tahun 2022 tetang Pedoman Pengelolaan Resiko Pemda
- e. Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng

2). Faktor penghambat indikator tersebut adalah:

- a. Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
- b. Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
- c. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia;
- d. Terbitnya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah; dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga paramater penilaiannya bertambah/berkembang
- e. Adanya perubahan metode pengujian yang mengarah pada perubahan kebijakan penilaian SPIP

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:

- a. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;
- b. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
- c. Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (1x setahun)
- d. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD

4. Nilai Kapabilitas APIP

1) Faktor pendorong indikator tersebut Adalah :

- a. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat;
- b. Memanfaatkan kesempatan dengan mengikuti Diklat Khusus STAR dengan pola pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Program STAR;
- c. Para pegawai secara mandiri berusaha meningkatkan kompetensi dengan menambah wawasan sendiri dengan cara rajin membaca maupun berdiskusi mengenai aturan terbaru;
- d. Melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), dimana pegawai yang pernah mengikuti suatu diklat dapat mentransfer ilmu yang diperoleh kepada teman-teman di kantor;
- e. Membentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP;
- f. Pada saat melaksanakan tugas pengawasan para pegawai membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang diketahui oleh Inspektur;
- g. Melakukan reviu berjenjangan pada setiap tugas audit sehingga dapat menghasilkan laporan yang baik;
- h. Para pimpinan mengajak agar bersemangat untuk mencapai level yang lebih tinggi sehingga output yang dihasilkan oleh Inspektorat dapat dihargai;
- i. Membuat Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan telah dibuat secara berkala, dan
- j. Memerintahkan agar seluruh SOP kegiatan dapat dilengkapi.

2) Faktor Penghambat tercapainya Indikator Kapabilitas APIP diantaranya:

- a. kompetensi SDM belum memadai

- b. kuantitas SDM belum memadai
- c. kurangnya komitmen
- d. kurangnya komunikasi
- e. anggaran belum memadai
- f. perencanaan kegiatan belum memadai, (7) sistem informasi tindak lanjut hasil pengawasan belum memadai.
- g. Adanya regulasi baru Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dengan adanya perubahan tersebut maka terdapat perubahan cara pengukuran Kapabilitas APIP sehingga menyebabkan level Kapabilitas APIP di seluruh Indonesia mengalami penurunan secara angka, tetapi meningkat secara kualitas

3) Upaya yang dilakukan dalam rangka Level Kapabilitas APIP diantaranya :

- a. Menetapkan kebijakan pemberian penghargaan dalam peningkatan kapabilitas APIP sebagai stimulan bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung agar lebih bersemangat dalam meningkatkan kapabilitasnya;
- b. Mempertimbangkan untuk melakukan penambahan dana operasional yang memadai sebesar 1% dari APBD;
- c. Menetapkan mekanisme pemberian reward/penghargaan bagi pegawai yang berkinerja memuaskan;
- d. Melaksanakan evaluasi intern dan ekstern melalui kegiatan Program Jaminan Kualitas dan Peningkatan (Quality Assurance and Improvement Program/QAIP) dan Telaah Sejawat guna menjamin mutu dan kualitas audit Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- e. Melakukan reviu atas Internal Audit Charter;
- f. Melakukan penyegaran kembali terhadap Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP dengan memperhatikan kompetensi dari masing-masing anggota tim;

5. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

- 1). Faktor Pendorong tercapainya Indikator Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi diantaranya :

- a. Menyusun, melengkapi dan melakukan pemutahiran dokumen untuk peningkatan penilaian IEPK;
 - b. Menyempurnakan Renstra OPD untuk menyatakan secara tertulis kebijakan antikorupsi.
 - c. Menyempurnakan profil risiko OPD dengan melakukan identifikasi, analisis, peta risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko korupsi;
 - d. Mengoptimalkan fungsi whistleblowing system;
 - e. Mendorong pimpinan satuan kerja untuk menyusun pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku terkait Pengendalian Fraud di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/ perbuatan yang sama tidak terulang.
- 2) Faktor Penghambat tercapainya Indikator Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi diantaranya :
- a. Belum dilakukan penetapan Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP) yang eksplisit terkait antikorupsi;
 - b. Perlu meningkatkan persepsi pegawai terhadap keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan di organisasi pemerintah daerah;
 - c. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran antikorupsi kepada pihak internal, belum dilakukan;
 - d. Penilaian risiko korupsi belum dilakukan;
 - e. Komitmen pimpinan terkait perilaku antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari perlu ditingkatkan;
 - f. Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi yang masih memerlukan perbaikan.
- 3) Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi diantaranya:
- a. Peningkatkan kompetensi auditor investigasi yang mendukung penugasan pengukuran IEPK;
 - b. Upaya peningkatan IEPK secara terintegrasi dengan upaya peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

- c. Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti penting pencegahan korupsi yang efektif dan IEPK menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas manajemen risiko dan penguatan pengendalian anti korupsi.

B. INDIKATOR PROGRAM

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Program pada Inspektorat kabupaten Temanggung dengan capaian kinerja 3 Indikator dengan Skala Nilai Peringkat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 4 Indikator dengan Skala Nilai Peringkat kinerja Sangat Tinggi (SR) dengan rincian sebagai berikut : Indikator Kinerja skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi :

1. Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP

1) Faktor Pendorong tercapainya indikator :

- a. Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan;
- b. Keinginan PD untuk segera menyelesaikan TL temuan untuk perbaikan organisasi;
- c. Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progres penyelesaian tindak lanjut pada Obrik;
- d. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
- e. Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa.

2) Faktor Penghambat tercapainya indikator :

- a. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
- b. Temuan pemeriksaa terkait kebijakan lama ditidaklanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu;
- c. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi
- d. SDM APIP kurang/terbatas

3) Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja

- a. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjt dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa;

- b. Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama;
 - c. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan.
- 2. Prsentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - 1) Faktor Pendorong tercapainya indikator kinerja
 - a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang matang dan terukur
 - b. Peningkatan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih
 - c. Penguatan SDM dan Anggaran
 - d. Regulasi kuat terhadap fungsi Inspektorat/Irbansus
 - e. Sistem penganggaran yang memadai
 - 2) Faktor Penghambat tercapainya indikator kinerja
 - a. Kurangnya komitmen darisebagian unit kerja/perangkat daerah
 - b. Kegiatan baru atau regulasi baru yang belum sepenuhnya dipahami
 - c. Mutasi pegawai / perubahan organisasi yang mengganggu rutinitas
 - d. Keterlambatan dokumen atau data yang diperlukan untuk pengawasan
 - e. Regulasi atau prosedur yang belum berjalan secara konsisten
 - f. beban administrasi dan tuntutan pelaporan yang cukup tinggi
 - 3) Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja
 - a. Penguatan perencanaan dan focus strategi
 - b. Optimalisasi pemantapan anggaran
 - c. Peningkatan kapasitas sumber daya dan perkuat monitoring
 - d. Peningkatan sistim komunikasi, publikasi dankolaborasi dengan pihak-pihak terkait;
 - e. Tindak lanjut rekomendasi yang berkesinambungan
- 3. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi
 - 1) Faktor Pendorong tercapainya indikator kinerja

- a. Perbup 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Kabupaten Temanggung;
- b. Adanya penugasan untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi terkait WBS;
- c. Perbup 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Kabupaten Temanggung;
- d. Perbup 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung,
- e. Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan;
- f. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan

2) Faktor Penghambat tercapainya indikator kinerja

- a. Perbup 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Kabupaten Temanggung;
- b. Adanya penugasan untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi terkait WBS;
- c. Perbup 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Kabupaten Temanggung;
- d. Perbup 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung,
- e. Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan;
- f. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan

3) Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja

- a. Memprioritaskan penugasan pemeriksaan investigasi;
- b. Sosialisasi benturan kepentingan;
- c. Perlu dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi;

Sedangkan Indikator Kinerja dengan Skala Nilai Peringkat Sangat Rendah yaitu :

- 1. Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I. II. III.IV. Khusus)

1) Faktor Pendukung tercapainya indikator kinerja :

- a. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku untuk menjamin independensi.

- b. Ketersediaan Anggaran yang memadai untuk kegiatan pengawasan
 - c. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan
 - d. Sinergi yang baik dengan lembaga pengawasan lain (seperti BPK, BPKP, KPK) dan penegak hukum
- 2). Faktor penghambat tercapaian indikator kinerja :
- a. Pengawasan masih dilaksanakan secara manual
 - b. Kurangnya tenaga teknis (tenaga IT yang mendukung pengelolaan sistem pengawasan digital dan fisik bangunan)
 - c. Adanya tugas tambahan dari pemerintah pusat atau kementerian yang mengubah prioritas pengawasan
 - d. Jumlah Auditor tidak sebanding dengan jumlah audit yang diperiksa
 - e. Kompetensi auditor belum memadai dalam menggunakan audit berbasis teknologi
- 3) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja :
- a. Diperlukan peningkatan auditor baik secara kualitas maupun kuantitas;
 - b. Diperlukan penyesuaian jadwal pengawasan agar dapat melaksanakan mandatori pusat tanpa mengurangi rencana pengawasan yang sudah direncanakan dalam PKPT
2. Persentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan
- 1) Faktor Pendorong tercapainya indikator kinerja
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - b. Adanya Tim Penyusun Kebijakan Teknis Pengawasan (PKPT)
 - c. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan
- 2) Faktor Penghambat tercapainya indikator kinerja
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan sering terlambat terbit sehingga pedoman perumusan kebijakan teknis pengawasan (PKPT) masih menggunakan Permendagri tahun sebelumnya

- b. Masih kurangnya pemahaman Tim Penyusun Kebijakan Teknis pada penyusunan PKPT Berbasis Risiko
- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja
 - a. Komunikasi dan koordinasi dengan Inspektorat Prov Jawa Tengah terkait pedoman yang digunakan untuk penyusunan kebijakan teknis pengawasan (PKPT)
 - b. Tim Inti Penyusun Kebijakan Teknis Pengawasan (PKPT) lebih aktif dan intensif dalam bekerja
 - c. Konsultasi dengan BPKP apabila ada kendala dalam penyusunan
- 3. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
 - 1) Faktor Pendorong tercapainya indikator kinerja
 - a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;
 - b. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan;
 - c. Adanya pendampingan dari Tim penilai internal Kabupaten Temanggung
 - 2) Faktor Penghambat tercapainya indikator kinerja
 - a. kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
 - b. Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;
 - c. Adanya mutasi pegawai
 - 3) Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja
 - a. Dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada OPD yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas
 - b. Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan ZI
 - c. Dilaksanakan sosialisasi kepada OPD yang dicanangkan sebagai ZI
- 4. Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya

- 1) Faktor Pendorong tercapainya indikator kinerja

Sebagian besar perangkat daerah telah menyusun risk register dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
 - 2) Faktor Penghambat tercapainya indikator kinerja

Belum semua Pegawai memahami tentang manajemen risiko
 - 3) Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja

Melaksanakan asistensi/pendampingan tentang manajemen risiko kepada seluruh Perangkat Daerah
7. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi
- 1) Faktor Pendorong tercapainya indikator kinerja
 - a. Perbup 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Kabupaten Temanggung;
 - b. Adanya penugasan untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi terkait WBS;
 - c. Perbup 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Kabupaten Temanggung;
 - d. Perbup 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung,
 - e. Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan;
 - f. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan
 - 2) Faktor Penghambat tercapainya indikator kinerja
 - a. kurangnya informasi sebagai bahan pemeriksaan investigasi dan komitmen atasan pengadu;
 - b. kurangnya SDM auditor
 - c. kurang pahamnya OPD mengenai benturan kepentingan;
 - d. kurangnya pemahaman penyelenggara negara/swasta tentang gratifikasi
 - e. belum memasyarakatnya UPG di Kabupaten Temanggung
 - 3) Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja
 - a. Memprioritaskan penugasan pemeriksaan investigasi;
 - b. Sosialisasi benturan kepentingan;
 - c. Perlu dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi;

B. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan

Capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 Kegiatan/Subkegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026
Inspektorat Kabupaten Temanggung

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Relaisasi Keuangan s/d Triwulan I 2026 (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW I Tahun 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PENGAWASAN			22.080.625.236	23.094.511.604	2.236.876.401				
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Persen	13.280.625.236	14.294.511.604	2.218.174.901	100	100	100	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	-				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-						
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	Dokumen	7.157.886.436	8.146.548.722	2.180.283.050	51/12			
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	7.057.886.436	8.046.548.722	2.177.647.050	58	58	100	Sangat Tinggi

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Relaisasi Keuangan s/d Triwulan I 2026 (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW I Tahun 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	100.000.000	100.000.000	2.636.000	12	3	25,00	Sangat Rendah
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen							
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		orang	2.800.000.000	2.800.000.000	-	58			
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	2.800.000.000	2.800.000.000	-	58	3	100,00	Sangat Tinggi
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.635.483.600	1.635.483.600	11.689.928				
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	50.000.000	50.000.000	-	12	3	25,00	Sangat Rendah
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	200.000.000	200.000.000	126.000	12	1	8,33	Sangat Rendah

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Relaisasi Keuangan s/d Triwulan I 2026 (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW I Tahun 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	220.000.000	220.000.000	102.000	12	1	8,33	Sangat Rendah
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	200.000.000	200.000.000	1.209.800	12	5	41,67	Sangat Rendah
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	965.483.600	965.483.600	10.252.128	12	2	16,67	Sangat Rendah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		unit	650.000.000	650.000.000	-	33	3		
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit				0			
b	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	100.000.000	100.000.000	-	31	0	0,00	Sangat Rendah
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	400.000.000	400.000.000	-	35	3	8,57	Sangat Rendah

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Relaisasi Keuangan s/d Triwulan I 2026 (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW I Tahun 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	150.000.000	150.000.000	-	16	0	0,00	Sangat Rendah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan	137.938.800	163.162.882	12.978.280	48	8		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	30.000.000	30.000.000	215.500	12	5	41,67	Sangat Rendah
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	10.000.000	10.000.000	-	12	0	0,00	Sangat Rendah
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	75.000.000	75.000.000	-	12	0	0,00	Sangat Rendah
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	22.938.800	48.162.882	12.762.780	12	3	25,00	Sangat Rendah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			899.316.400	899.316.400	13.223.643	104	8		

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Relaisasi Keuangan s/d Triwulan I 2026 (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW I Tahun 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	300.000.000	300.000.000	12.165.543	14	5	35,71	Sangat Rendah
b	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25.000.000	25.000.000	-	29	3	10,34	Sangat Rendah
c	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	100.000.000	100.000.000	1.058.100	61	0	0,00	Sangat Rendah
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	474.316.400	474.316.400	-	3	0	0,00	Sangat Rendah
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan			5.050.000.000	5.050.000.000	11.565.500	13			
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Laporan dan Dokumen	3.850.000.000	3.850.000.000	10.742.000			62,35	
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Laporan	350.000.000	350.000.000	573.500	3	0	0,00	Sangat Rendah
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan		696.824.000		60	11	18,33	Sangat Rendah

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Relaisasi Keuangan s/d Triwulan I 2026 (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW I Tahun 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.219.500	120	1	0,83	Sangat Rendah
d	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1.000.000.000	303.176.000	-	1	1	100,00	Sangat Tinggi
e	Pengawasan Desa	Jumlah Hasil pengawasan Desa	Laporan	500.000.000	500.000.000	2.825.500	45	10	22,22	Sangat Rendah
f	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Dokumen	1.000.000.000	1.000.000.000	6.123.500	85	10	11,76	Sangat Rendah
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Laporan	1.200.000.000	1.200.000.000	823.500	13	8		
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian kerugian Negara	Laporan	600.000.000	600.000.000	-	1	5	500	Sangat Tinggi
b	Pengawasan dgn Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	600.000.000	600.000.000	823.500	12	3	25,00	Sangat Rendah
B	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			3.750.000.000	3.750.000.000	7.136.000				

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Relaisasi Keuangan s/d Triwulan I 2026 (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW I Tahun 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Rekomendasi	850.000.000	850.000.000	-	1	0		
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi	850.000.000	850.000.000	-	1	0	0,00	Sangat Rendah
2	Pendampingan dan Asistensi		PD dan kegiatan	2.900.000.000	2.900.000.000	7.136.000				
a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	1.300.000.000	1.300.000.000	1.128.500	48	1	2,08	Sangat Rendah
b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000	-	7	2	28,57	Sangat Rendah
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangkat daerah	600.000.000	600.000.000	6.007.500	46	11	23,91	Sangat Rendah

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan sub kegiatan, diketahui bahwa terdapat 31 sub kegiatan dengan realisasi sub kegiatan tidak memenuhi target (kurang dari 50%) sebanyak 27 sub kegiatan, telah memenuhi target kinerja yang direncanakan sejumlah 3 sub kegiatan (100%) dan sub kegiatan yang telah melbihi target kinerja yang direncanakan sebanyak 1 sub kegiatan (500%). Adapun penjelasan secara rinci sebagai berikut :

a. sub kegiatan tidak memenuhi target (kurang dari 50%):

1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (25%);
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (25%);
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (8,33%);
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (8,33%);
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu (41,67%);
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (16,67%);
7. Pengadaan Mebel (0%);
8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8,57%);
9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (0%);
10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (41,67%);
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (0%);
12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (0%);
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (25%);
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (35,71);
15. Pemeliharaan mebel (10,34%);
16. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (0%);
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (0%);
18. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (0%);
19. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (18,33%);
20. Reviu Laporan Kinerja (0,83%);
21. Pengawasan Desa (22,22%);
22. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP (11,76%);
23. Pengawasan dgn Tujuan Tertentu (25%);
24. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (0%);
25. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (2,08%);

26. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (28,57%);
 27. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (23,91%).
- b. Realisasi Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan:
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
 3. Reviu Laporan Keuangan
- c. Sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja yang direncanakan:
1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (500%)

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 pada Triwulan I belum sepenuhnya dilaksanakan/ masih dalam duapuluhlima persen dari target yang direncanakan, sehingga realiasi belum sepenuhnya dapat tercapai;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung :

Terhadap capaian kinerja yang tidak tercapai ditargetkan akan tercapai pada akhir Renstra 2025-2029, dengan mendasarkan pada sub kegiatan bersifat penyediaan (rutin). sedangkan penyebab dari kenaikan harga akan dievaluasi Kembali dengan mengajukan Standar Satuan Harga pada saat perubahan anggaran. Dengan begitu diharapkan capaian kinerja tetap bisa tercapai.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain penyebab dari kenaikan harga akan dievaluasi kembali dengan mengajukan Standar Satuan Harga pada saat perubahan anggaran. Dengan demikian perubahan harga dapat disesuaikan dalam DPA perubahan sesuai dengan harga pasar dan diharapkan capaian kinerja tetap bisa tercapai.

- c. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja di Tahun 2026:
1. Peningkatan Kapabilitas APIP dan kompetensi;
 2. Penguatan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 3. Penguatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 4. Efektifitas pelaksanaan pengawasan;
 5. Mendorong keterlibatan publik dan penguatan budaya antikorupsi;
 6. Digitalisasi proses audit dan integrasi sistem pengawasan;serta
 7. Meningkatkan kerjasama antar APIP dan Aparat Penegak Hukum

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan I. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Renja Tahun 2026

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/berkurang (+/-)		Ket
		PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	PAGU INDIKATIF APBD (Rp)		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6= (5-3)	7=(5-4)	8
	INSPEKTORAT	22.080.625.236	23.121.405.722	23.121.405.722	1.040.780.486	-	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	22.080.625.236	23.121.405.722	23.121.405.722	1.040.780.486	-	
	INSPEKTORAT DAERAH	22.080.625.236	23.121.405.722	23.121.405.722	1.040.780.486	-	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.280.625.236	14.321.405.722	14.321.405.722	1.040.780.486	-	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	500.000	500.000	500.000	Tambah sub kegiatan pendukung indikator nilai Ev AKIP PD
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	500.000	500.000	500.000	Tambah sub kegiatan pendukung indikator nilai Ev AKIP PD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.157.886.436	8.173.442.840	8.165.688.580	1.007.802.144	- 7.754.260	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.057.886.436	8.073.442.840	8.073.442.840	1.015.556.404	-	Pergeseran antar rekening belanja
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000.000	100.000.000	91.745.740	- 8.254.260	- 8.254.260	berkurang untuk sub kegiatan : Penyusunan Dokumen perencanaan PD, Evaluasi Kinerja PD, Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Jasa Pelayanan perkantoran

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/berkurang (+/-)		Ket
		PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	PAGU INDIKATIF APBD (Rp)		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6= (5-3)	7=(5-4)	8
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		0	500.000	500.000	500.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	-	-	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	-	-	Penyesuaian Rekening Belanja
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.635.483.600	1.635.483.600	1.635.483.600	-	-	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	-	
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	220.000.000	220.000.000	220.000.000	-	-	
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	-	Pergeseran antar sub belanja
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	965.483.600	965.483.600	965.483.600	-	-	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	650.000.000	650.000.000	650.000.000	-	-	
a	Pengadaan Mebel	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	-	
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	-	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.938.800	163.162.882	169.917.142	31.978.342	6.754.260	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	Pergeseran antar rekening belanja (pembelian lisensi AI premium)
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	-	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/berkurang (+/-)		Ket
		PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	PAGU INDIKATIF APBD (Rp)		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6= (5-3)	7=(5-4)	8
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.938.800	48.162.882	54.917.142	31.978.342	6.754.260	Penambahan Gaji p3k paruh waktu, bulan des, gaji 13 dan thr, diambilkan dari sub kegiatan lembur
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	899.316.400	899.316.400	899.316.400	-	-	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	-	
b	Pemeliharaan Mebel	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunanlainnya	474.316.400	474.316.400	474.316.400	-	-	Pergeseran antar sub belanja (pemeliharaan gedung skala kecil)
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.050.000.000	5.050.000.000	5.050.000.000	-	-	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.850.000.000	3.850.000.000	3.850.000.000	-	-	
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-	-	
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	0	696.824.000	696.824.000	696.824.000	-	Penyesuaian Rekening Belanja
c	Reviu Laporan Kinerja	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	
e	Reviu Laporan Keuangan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	
f	Pengawasan Desa	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	-	
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.000.000.000	303.176.000	303.176.000	-696.824.000		Penyesuaian Rekening Belanja
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/berkurang (+/-)		Ket
		PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	PAGU INDIKATIF APBD (Rp)		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6= (5-3)	7=(5-4)	8
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	600.000.000	600.000.000	600.000.000	-	-	Penyesuaian Rekening Belanja
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	600.000.000	600.000.000	600.000.000	-	-	
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.750.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000	-	-	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	850.000.000	850.000.000	850.000.000	-	-	
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	850.000.000	850.000.000	850.000.000	-	-	
2	Pendampingan dan Asistensi	2.900.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000	-	-	
a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	-	-	Penyesuaian Rekening Belanja
b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	Penyesuaian Rekening Belanja
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	600.000.000	600.000.000	600.000.000	-	-	
		22.080.625.236	23.121.405.722	23.121.405.722	1.040.780.486	0	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Dari tabel di atas, berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2026, maka Inspektorat Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Awal Renja	:Rp 22.080.625.236,-
2. Pagu Awal APBD (Perubahan Perbup II)	:Rp 23.121.405.722,-
3. Pagu Perubahan	:Rp 23.121.405.722,-
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja	:Rp 1.040.780.486,-
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal APBD	:Rp 0

Selisih antara Pagu Awal Renja dengan Pagu Perubahan antara lain disebabkan:

- 1. Penambahan Sub Kegiatan baru pendukung indikator IKM dan Nilai AKIP Perangkat Daerah;
 - 2. Penyesuaian Rekening Belanja;
 - 3. Pergeseran antar sub belanja dalam satu kegiatan;
 - 4. Kebutuhan barang yang belum tercukupi dalam DPA penetapan;dan
 - 5. Penambahan pagu anggaran untuk mencukupi Gaji P3K paruh waktu;
- Sedangkan selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan tidak ada penambahan pagu anggaran, namun terdapat perubahan menyesuaikan kebutuhan antara lain disebabkan:

- 1. Penambahan pagu anggaran untuk mencukupi Gaji P3K paruh waktu;
- 2. Penambahan Sub Kegiatan baru pendukung indikator IKM dan Nilai AKIP Perangkat Daerah;

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2026

Rincian rencana Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2026 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat
Kabupaten Temanggung Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan					Setelah perubahan				Bertambah/berkurang		Sumber Dana	Ket
			LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	PAGU INDIKATIF APBD (Rp)	LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
	INSPEKTORAT					22.080.625.236	23.121.405.722				23.121.405.722	1.040.780.486	-		
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					22.080.625.236	23.121.405.722				23.121.405.722	1.040.780.486	-		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					22.080.625.236	23.121.405.722				23.121.405.722	1.040.780.486	-		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.280.625.236	14.321.405.722				14.321.405.722	1.040.780.486	-		
60101201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0				1.000.000	1.000.000	1.000.000		
60101201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Kab. Temanggung		Dokumen	500.000	500.000	500.000	DAU	Tambah sub kegiatan pendukung indikator nilai Ev AKIP PD
60101201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Kab. Temanggung		Laporan	500.000	500.000	500.000	DAU	Tambah sub kegiatan pendukung indikator nilai Ev AKIP PD
6.01.012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun		24	Dokumen	7.157.886.436	8.173.442.840		24	Dokumen	8.165.688.580	1.007.802.144	- 7.754.260		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan					Setelah perubahan				Bertambah/berkurang		Sumber Dana	Ket
			LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	PAGU INDIKATIF APBD (Rp)	LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
6.01.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	59	Orang/bulan	7.057.886.436	8.073.442.840	Kab. Temanggung	59	Orang/bulan	8.073.442.840	1.015.556.404	-	DAU	Pergeseran antar rekening belanja
6.01.0 1.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Temanggung	12	Dokumen	100.000.000	100.000.000	Kab. Temanggung	12	Dokumen	91.745.740	- 8.254.260	- 8.254.260		berkurang untuk sub kegiatan : Penyusunan Dokumen perencanaan PD, Evaluasi Kinerja PD, Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Jasa Pelayanan perkantoran
6.01.0 1.2.02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD					0				500.000	500.000	500.000		
6.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		59	Orang	2.800.000.000	2.800.000.000		59	Orang	2.800.000.000	-	-		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan					Setelah perubahan				Bertambah/berkurang		Sumber Dana	Ket
			LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	PAGU INDIKATIF APBD (Rp)	LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
6.01.0 1.2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Temanggung	59	Orang	2.800.000.000	2.800.000.000	Kab. Temanggung	59	Orang	2.800.000.000	-	-		Penyesuaian Rekening Belanja
6.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan serta Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		27 dan 24	Paket dan Laporan	1.635.483.600	1.635.483.600		27 dan 24	Paket dan Laporan	1.635.483.600	-	-		
6.01.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	1	Paket	50.000.000	50.000.000	Kab. Temanggung	1	Paket	50.000.000	-	-		
6.01.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	Paket	200.000.000	200.000.000	Kab. Temanggung	12	Paket	200.000.000	-	-		
6.01.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	Paket	220.000.000	220.000.000	Kab. Temanggung	12	Paket	220.000.000	-	-		
6.01.0 1.2.06. 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	12	Laporan	200.000.000	200.000.000	Kab. Temanggung	12	Laporan	200.000.000	-	-		Pergeseran antar sub belanja

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan					Setelah perubahan				Bertambah/berkurang		Sumber Dana	Ket
			LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	PAGU INDIKATIF APBD (Rp)	LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
6.01.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	12	Laporan	965.483.600	965.483.600	Kab. Temanggung	12	Laporan	965.483.600	-	-		
6.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel, Unit Peralatan dan Sarana Prasarana Gedung Kantor		17	Unit	650.000.000	650.000.000		17	Unit	650.000.000	-	-		
6.01.0 1.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Temanggung	35	Unit	100.000.000	100.000.000	Kab. Temanggung	35	Unit	100.000.000	-	-		
6.01.0 1.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Temanggung	36	Unit	400.000.000	400.000.000	Kab. Temanggung	36	Unit	400.000.000	-	-		
6.01.0 1.2.07. 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Temanggung	9	Unit	150.000.000	150.000.000	Kab. Temanggung	9	Unit	150.000.000	-	-		
6.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		24	Laporan	137.938.800	163.162.882		24	Laporan	169.917.142	31.978.342	6.754.260		
6.01.0 1.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	12	Laporan	30.000.000	30.000.000	Kab. Temanggung	12	Laporan	30.000.000	-	-		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan					Setelah perubahan				Bertambah/berkurang		Sumber Dana	Ket
			LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	PAGU INDIKATIFAPBD (Rp)	LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
6.01.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kab. Temanggung	12	Laporan	10.000.000	10.000.000	Kab. Temanggung	12	Laporan	10.000.000	-	-		Pergeseran antar rekening belanja (pembelian lisensi AI premium)
6.01.0 1.2.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Temanggung	12	Laporan	75.000.000	75.000.000	Kab. Temanggung	12	Laporan	75.000.000	-	-		
6.01.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Temanggung	12	Laporan	22.938.800	48.162.882	Kab. Temanggung	12	Laporan	54.917.142	31.978.342	6.754.260		Penambahan Gaji p3k paruh waktu, bulan des, gaji 13 dan thr, diambilkan dari sub kegiatan lembur
6.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas, Mebel , Peralatan dan Mesin yang Dipelihara</i>		57	Unit	899.316.400	899.316.400		57	Unit	899.316.400	-	-		
6.01.0 1.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Kab. Temanggung	15	Unit	300.000.000	300.000.000	Kab. Temanggung	15	Unit	300.000.000	-	-		Pergeseran antar rekening belanja

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan					Setelah perubahan				Bertambah/berkurang		Sumber Dana	Ket
			LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	PAGU INDIKATIF APBD (Rp)	LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
6.01.0 1.2.09. 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Temanggu ng	30	Unit	25.000.000	25.000.000	Kab. Temanggu ng	30	Unit	25.000.000	-	-		
6.01.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Temanggu ng	34	Unit	100.000.000	100.000.000	Kab. Temanggu ng	34	Unit	100.000.000	-	-		
6.01.0 1.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Temanggu ng	2	Unit	474.316.400	474.316.400	Kab. Temanggu ng	2	Unit	474.316.400	-	-		Pergeseran antar sub belanja (pemeliharaan gedung skala kecil)
6.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					5.050.000.000	5.050.000.000				5.050.000.000	-	-		
6.01.0 2.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai PKPT Jumlah Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP eksternal yang ditindaklanjuti Jumlah Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP Internal yang ditindaklanjuti			Laporan dan Dokumen	3.850.000.000	3.850.000.000			Laporan dan Dokumen	3.850.000.000	-	-		
6.01.0 2.2.01. 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Temanggu ng	3	Laporan	350.000.000	350.000.000	Kab. Temanggu ng	3	Laporan	350.000.000	-	-		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan					Setelah perubahan				Bertambah/berkurang		Sumber Dana	Ket
			LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	PAGU INDIKATIFAPBD (Rp)	LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
6.01.0 2.2.01. 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	60	Laporan	0	0	Kab. Temanggung	60	Laporan	0	-	-		
6.01.0 2.2.01. 0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Temanggung	110	Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	Kab. Temanggung	110	Laporan	1.000.000.000	-	-		
6.01.0 2.2.01. 0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Temanggung	61	Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	Kab. Temanggung	61	Laporan	1.000.000.000	-	-		
6.01.0 2.2.01. 0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Temanggung	45	Laporan	500.000.000	500.000.000	Kab. Temanggung	45	Laporan	500.000.000	-	-		
6.01.0 2.2.01. 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Temanggung	80	Dokumen	1.000.000.000	1.000.000.000	Kab. Temanggung	80	Dokumen	1.000.000.000	-	-		Penyesuaian Rekening Belanja
6.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan		14	Laporan	1.200.000.000	1.200.000.000		14	Laporan	1.200.000.000	-	-		
6.01.0 2.2.02. 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab. Temanggung	1	Laporan	600.000.000	600.000.000	Kab. Temanggung	1	Laporan	600.000.000	-	-		Penyesuaian Rekening Belanja
6.01.0 2.2.02. 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Temanggung	12	Laporan	600.000.000	600.000.000	Kab. Temanggung	12	Laporan	600.000.000	-	-		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan					Setelah perubahan				Bertambah/berkurang		Sumber Dana	Ket
			LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	PAGU INDIKATIF APBD (Rp)	LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					3.750.000.000	3.750.000.000				3.750.000.000	-	-		
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	<i>Presentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang Ditetapkan</i>		100	Perse n	850.000.000	850.000.000		100	Perse n	850.000.000	-	-		
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>	Kab. Temanggu ng	1	Reko menda si	850.000.000	850.000.000	Kab. Temanggu ng	1	Reko mend asi	850.000.000	-	-		
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	<i>Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi</i>		103	Peran gkat Daera h	2.900.000.000	2.900.000.000		103	Peran gkat Daera h	2.900.000.000	-	-		
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	Kab. Temanggu ng	48	Peran gkat Daera h	1.300.000.000	1.300.000.000	Kab. Temanggu ng	48	Peran gkat Daera h	1.300.000.000	-	-		Penyesuaian Rekening Belanja
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	Kab. Temanggu ng	7	Kegiat an	1.000.000.000	1.000.000.000	Kab. Temanggu ng	7	Kegiat an	1.000.000.000	-	-		Penyesuaian Rekening Belanja

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan					Setelah perubahan				Bertambah/berkurang		Sumber Dana	Ket
			LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	PAGU INDIKATIFAPBD (Rp)	LOKASI	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF RENJA (Rp)	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
6.01.0 3.2.02. 0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	Kab. Temanggung	46	Perangkat Daerah	600.000.000	600.000.000	Kab. Temanggung	46	Perangkat Daerah	600.000.000	-	-		
JUMLAH						22.080.625.236	23.121.405.722				23.121.405.722	1.040.780.486	0		

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2026

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang telah disusun sesuai dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan I ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Anggaran Tahun 2026, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2026, Inspektorat Kabupaten Temanggung terdiri dari 2 program 10 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan total pagu indikatif Rp23.121.405.722,-. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Perubahan Renja Tahun 2026 juga senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2026 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 28 Agustus 2026



INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 196612111994031005